

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Disusun Oleh:
INDRAYANI, M.Ak.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya penulisan modul Akuntansi Sektor Publik dapat terselesaikan dengan baik. Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang disajikan dalam bentuk materi terkait Akuntansi Sektor Publik.

Modul Akuntansi Sektor Publik ini diharapkan dapat membantu mahasiswa agar dapat menjadi referensi tentang ruang lingkup, peranan, tujuan, akuntabilitas, regulasi, akuntansi manajemen, pengendalian manajemen, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, audit, pertanggungjawaban dan sistem akuntansi organisasi sektor publik di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa modul ini tentu memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis dengan lapang dada menerima masukan dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya di masa yang akan datang. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis,

Indrayani, M.Ak.

BAB I

GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. Pengertian Akuntansi Sektor Publik?

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, analisis, meringkas, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk organisasi publik. Sektor publik sendiri memiliki makna sebagai seluruh organisasi yang tidak dijalankan secara pribadi. Namun didirikan, dibiayai yang dioperasikan oleh pemerintah atas nama publik. Berepa ahli berbeda dalam mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik. Di antara pengertian Akuntansi Sektor Publik yaitu: akuntansi sektor publik sebagai proses pengukuran identifikasi pencatatan serta pelaporan seluruh transaksi keuangan dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengambil keputusan ekonomi. Sedangkan lainnya menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang berguna untuk mencatat kegiatan ekonomi suatu organisasi nirlaba atau non-profit.

Indra Bastian (2014) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Sedangkan Mardiasmo (2021) menyatakan akuntansi sektor publik adalah informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Abdul Halim (2014) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Manajemen control, memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mengelola organisasi secara tepat, efisien, cepat dan ekonomis dalam hal operasi ataupun penggunaan sumber daya yang dipercayakan atau dianggarkan untuk suatu instansi atau organisasi.

Akuntabilitas. Akuntabilitas pada akuntansi sektor publik hampir sama dengan manajemen control. Manajemen kontrol menyediakan informasi bagi manajer dari organisasi sektor publik dalam melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sumber daya atau divisi yang berada di bawah kewenangannya.

Tujuan lainnya adalah untuk melaporkan kegiatan pada publik atas operasi organisasi pemerintah dan anggaran publik.

C. Pengertian Organisasi Publik?

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan publik dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara yang diatur dengan hukum.

Ciri-ciri organisasi sektor publik

- Tidak mencari keuntungan finansial
- Dimiliki secara kolektif oleh publik
- Kepemilikan sumber daya bukan berbentuk saham
- Keputusan terkait kebijakan atau operasi berdasarkan konsensus

Ada 4 tipe organisasi sektor publik

a. *Pure-Profit Organization*, Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta dan kreditor. Contohnya pasar swalayan, salon kecantikan, dan distro.

b. *Quasi-Profit Organization*. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik.

c. *Quasi-Nonprofit organization*. Menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud sama untuk melayani masyarakat memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta, dan kreditor. Contohnya rumah sakit dan institusi pendidikan.

d. *Pure-nonprofit organization*. Menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud utama untuk melayani yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah, dan sumbangan. Contohnya panti asuhan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi pemerintahan.

D. Perbedaan dan Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta

Bagian dari sistem ekonomi negara, bagian internal sistem ekonomi negara dan menggunakan sumber daya yang sama guna mencapai tujuan organisasi. Kelangkaan sumber daya. Keduanya dituntut untuk menggunakan sumber daya secara ekonomis efektif dan efisien.

Proses pengendalian manajemen, membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Dalam melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan pengorganisasian dan pengendalian. Produk menghasilkan produk yang memiliki jenis yang sama atau bergerak pada bidang yang sama.

E. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik dan Perkembangannya

Abad ke-1 sampai dengan abad ke-5 disebut periode Roma. Praktek akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan. Semua pejabat yaitu Gubernur ataupun Kaisar melakukan pungutan pajak.

Pertengahan abad ke-14 atau periode Eropa. Di Genoa praktek pencatatan transaksi keuangan berwujud bukti transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat. Kemudian, berkembang dalam proses perdagangan antar negara. di saat ini belahan dunia lain gereja memasuki pemerintahan.

Awal abad ke-15 periode Eropa. Kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris. Proses pelaporan dikembangkan lebih rinci terutama pada informasi tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang yang diproduksi, harga penjualan, dan metode pemasaran.

Akhir abad ke-18 periode Eropa. Terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. inisiatif individu lebih dihargai dan berpeluang luas. mengakibatkan revolusi industri di Inggris yang menunjukkan pengembangan akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan lebih dipicu perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

Abad ke-19 sampai abad ke-20 periode Eropa. Profesi akuntan sektor publik berkembang lebih lambat. interpretasi yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan penarikan Pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Periode 1950 sampai 1960-an. Sektor publik memiliki peran utama dalam strategi pembangunan. Pada 1970an, ada kritikan dan serangan dari pendukung

teori pembangunan radikal. Selanjutnya tahun 1980- an, reformasi sektor publik dilakukan di negara industry. Hal ini ditandai dengan diadopsinya *New Public Management* (NPM) dan *reinventing government*.

F. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Akuntansi sektor publik di Indonesia memiliki perkembangan yang baik, ditandai dengan adanya peraturan yang mengatur penerapan akuntansi sektor publik khususnya pemerintahan dan adanya standar akuntansi pemerintah (SAP). Perkembangan meliputi bidang konsentrasi: akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pemeriksaan akuntansi (auditing).

G. Barang dan Jasa Publik

Barang dan jasa publik adalah barang/jasa yang dapat dikonsumsi/digunakan semua orang tanpa terkecuali. Barang dan jasa publik memiliki dua sifat utama yaitu tidak dibatasi (*non excludable*) dan dapat dinikmati oleh banyak orang pada saat yang bersamaan (*non rival*). Selain kedua sifat tersebut masih ada sifat lainnya yang melekat yaitu tidak dapat ditolak (*non rejecable*) dan tidak dapat dibagi-bagi (*non indivisible*).

H. Profesi Akuntansi Sektor Publik

Program studi akuntansi sektor publik sejatinya akan diarahkan untuk berkarir dalam lingkup sektor publik juga seperti pada kantor pemerintahan sebagai PNS atau non PNS. Walaupun pada dasarnya dalam lingkup sektor publik tidak menutup kemungkinan bagi lulusan untuk menyebrang ke sektor swasta memiliki kompetensi di bidang akuntansi yang juga dibutuhkan di sektor swasta.

Pemeriksaan keuangan, profesi di bidang pemeriksaan keuangan ini memiliki tugas dari jabatan yang sangat banyak diantaranya adalah memahami sistem akuntansi meninjau ulang laporan keuangan yang relevan dalam melakukan audit. Pegawai pajak atau pegawai persiapan pajak. Pegawai pajak akan ditempatkan sebagai pegawai pemerintah. Tugasnya yaitu menyiapkan pengembalian pajak untuk individu maupun usaha kecil.

Auditor akuntan publik. Auditor independen yang memiliki tugas sebagai pengaudit laporan keuangan yang bertujuan menyatakan opini suatu laporan keuangan.

BAB II

REGULASI DAN PERKEMBANGANNYA DALAM RUANG SEKTOR PUBLIK

A. Definisi Regulasi Publik

Regulasi berasal dari bahasa asing yaitu *regulation* atau peraturan. Regulasi Publik adalah segala peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan dll.

B. Teknik Penyusunan Regulasi Publik

1. Pendahuluan (Disusun karena ada isu atau masalah)
2. Mengapa diatur? (Mencari jawaban terhadap isu)
3. Permasalahan (Regulasi digunakan apabila isu tersebut tidak dapat di alternatif)
4. Dengan apa diatur? (Hal ini harus dirumuskan sehingga segeradisikapi)
5. Diskusi dan Musyawarah (Memerlukan forum diskusi untuk mengupas tuntas)
6. Catatan (Hasil Proses Diskusi)

C. Kebutuhan Regulasi dan Standar di Sektor Publik

1. Kebutuhan Regulasi

Aktivitas organisasi sektor publik ini memenuhi hajat orang banyak, yang dimana kita tidak mungkin terlepas dengan masalah-masalah yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu kita membutuhkan regulasi sebagai aturan meminimkan kesalahan yang ada. Contoh Regulasi : Pemerintahan tidak terlepas dengan kesalahan dalam bidang keuangan baik itu rugi atau untungnya dia .Masyarakat hanya bisa angkat tangan mengenai hal itu. Namun disinilah fungsi regulasi yaitu meminimkan kesalahan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Standar Sektor Publik

Dalam konteks organisasi sektor publik, sebuah paket standar akuntansi tersendiri diperlukan karena kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial, diantaranya

adanya kewajiban pertanggungjawaban yang lebih besar kepada publik atas penggunaan dana-dana yang dimiliki.

D. Perkembangan Regulasi di Sektor Publik

1. Regulasi Nirlaba

a) Regulasi tentang Yayasan

- Undang-Undang No.16/2001
- Undang-Undang No.28/2004

b) Regulasi tentang Partai Politik

- Undang-Undang No.2/1999
- Undang-Undang No.31/2002
- Undang-Undang No.2/2008

c) Regulasi tentang Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan Universitas yang pertama kali ditetapkan berstatus BHMN oleh pemerintah adalah

- 1) Universitas Indonesia (UI): PP No 152/2000
- 2) Universitas Gajah Mada (UGM): PP No 153/2000
- 3) Institut Pertanian Bogor (IPB): PP No 154/2000
- 4) Institut Teknologi Bandung (ITB): PP No 155/2000
- 5) Universitas Sumatera Utara (USU): PP No 56/2003
- 6) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung: PP No6/2004
- 7) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya: PP No 30/2006

Ciri-Ciri BHMN

- Memiliki Majelis Wali Amanat (MWA)
- Memiliki Senat Akademik (SA)
- Memiliki Otonomi manajemen dana dan akademik

Pada tahun 2008 disahkan undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Prinsip BHP :

- a. Nirlaba
- b. Otonom
- c. Akuntabel
- d. Transparan
- e. Penjamin mutu

- f. Layanan prima
- g. Akses yang berkeadilan
- h. Keberagaman
- i. Keberlanjutan
- j. Partisipasi atas tanggung jawab negara

Regulasi tentang Badan Layanan Umum

Regulasi khusus yang menjelaskan tentang BLU adalah PP no 23/2000 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Kriteria untuk Menjadi BLU:

- a. Bukan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan sebagai satuan kerja instansi pemerintah. Contohnya: Unmul.
- b. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi
- c. Berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya:
 - Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja
 - Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan,
 - BLU bertanggung jawab menyajikan layanan yang diminta.

Perkembangan Regulasi Keuangan Negara

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah merubah beberapa hal sebagai berikut:
 - Kekuasaan atas Pengelolaan keuangan Negara
 - Penyusunan dan Penetapan APBN
 - Penyusunan dan Penetapan APBD
 - Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing.
 - Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
 - Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntans publik berdasarkan ketentuan

UU yang selanjutnya wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara
 - Kewenangan pejabat perbendaharaan negara
 - Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara ataudaerah
 - Pengelolaan uang negara/daerah
 - Pengelolaan piutang dan utang negara
 - Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah
 - Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD
 - Pengendalian intern pemerintah
 - Penyelesaian kerugian negara/daerah
 - Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
- 4) Perkembangan Regulasi Otonomi Daerah
 - Undang-Undan Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perkembangan Standar Di Sektor Publik

Pada tahun 2002, Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP) telah mengembangkan standar- standar akuntansi yang direkomendasi untuk digunakan pada entitas- entitas sektor publik yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP). Dalam standar ini, IAI – KASP telah melakukan harmonisasi terhadap akuntansi,laporan keuangan dan auditing antar yudirisdiksi dan mana yang tepat, antara sektor publik dan swasta, dan untuk mengharmonisasikan laporan keuangan antara accounting basisdan economic basis.

Standar Akuntanasi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional, dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan untuk semua yuridiksi.

E. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

1. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi:

- Standar umum
- Standar pelaksanaan
- Standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa

2. Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai.

Proses pemeriksaan meliputi:

- Perencanaan,
- Pelaksanaan,
- Pelaporan, dan
- Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

a. Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara

- 1) Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan
- 2) Pemeriksaan kinerja tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

b. Unsur-Unsur Pemeriksaan Keuangan Negara

- 1) Hubungan tiga pihak, yang terdiri atas:
 - Keuangan negara
 - Pihak yang bertanggung jawab, dan
 - Pengguna LHP
- 2) Hal pokok (*subject matter*) dan informasi hal pokok (*subject matter information*)
- 3) Kriteria pemeriksaan
- 4) Bukti pemeriksaan;

- 5) Laporan hasil pemeriksaan; dan
- 6) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

c. Pihak Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

- 1) Pemeriksa keuangan negara. BPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- 2) Pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang diperiksa, yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan/atau bertanggung jawab mengelola hal pokok, dan/atau bertanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan antara lain Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah.
- 3) Pengguna LHP
- 4) Lembaga perwakilan
- 5) Pemerintah
- 6) Pihak lain yang berkepentingan

d. Kriteria Pemeriksaan

1. Relevan
2. Lengkap
3. Andal
4. Netral
5. Dapat dipahami

3. Penyusunan Regulasi Publik

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah public diawali dengan merumuskan masalah yang akan diatur. perumusan masalah public meliputi :

- Apa masalah publik yang ada?
- Siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah?
- Siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah?
- Analisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik?
- Tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah publik?

b. Perumusan Draft Regulasi Publik

c. Prosedur Pembahasan

d. Pengesahan dan Pengundangan

BAB III

RERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. Definisi Rerangka Konseptual ASP

Rerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sector public seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan.

Rerangka konseptual ini merupakan acuan dalam pengembangan standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konflik semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.

B. Tujuan dan Peranan Rerangka Konseptual ASP

Rerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi :

1. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan.
2. Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik.
3. Auditor, seperti BPK dan KAP, untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
4. Para pemakai laporan keuangan sector public untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik.

C. Lingkup Rerangka Konseptual ASP

Sebagai sebuah siklus, akuntansi sektor publik terangkai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini akan meliputi:

1. Perencanaan publik
2. Penganggaran publik
3. Realisasi anggaran publik
4. Pengadaan barang dan jasa publik
5. Pelaporan sektor publik
6. Audit sektor publik
7. Pertanggungjawaban publik

D. Elemen Laporan Keuangan Sektor Publik

Posisi Keuangan, unsur yang terkait langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sbb :

1. Aktiva
2. Kewajiban
3. Ekuitas
4. Kinerja
5. Pendapatan
6. Biaya
7. Penyesuaian pemeliharaan modal

E. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik

Pengakuan (*recognition*) dilakukan dengan menyatakan posterebut, baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika :

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi publik.
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan sector public ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Sejumlah dasar pengukuran

yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan sector public ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik.

Suatu pos dapat dianggap memenuhi persyaratan pengakuan di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik. Berbagai dasar pengakuan tersebut adalah :

- a. Biaya Historis (*historical cost*)
- b. Biaya Saat ini (*current cost*)
- c. Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*)
- d. Nilai sekarang (*present value*)

F. Akuntansi Berbasis Kas vs Berbasis AkruaI dan Modifikasinya

1. Berbasis Kas

Sistem akuntansi ini hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun hanya sebagai tambahan laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Focus pemecahan permasalahan adalah mendefinisikan jumlah pendapatan yang dapat dipakai tanpa mengurangi modal.

2. Berbasis AkruaI

Definisi konsep akuntansi akruaI sebagaimana tercantum pada SSAP adalah "penerimaan dan biaya bertambah sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan.

BAB IV

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

A. Definisi Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Menurut *Institute of Management Accountants* tahun 1981 memiliki definisi akuntansi manajemen sebagai suatu proses untuk pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, pengakumulasian, penyiapan, pengkomunikasian informasi keuangan/finansial, serta penginterpretasian keuangan yang tentunya akan digunakan oleh bagian manajemen perencanaan, evaluasi serta pengendalian organisasi dan untuk menjamin supaya sumber daya yang digunakan secara akurat dan tepat.

1. Peran Perencanaan

Dalam perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini.

2. Informasi Sebagai Alat Perencanaan

- a. Informasi sifatnya rutin *ad hoc*
- b. Informasi kuantitatif dan kualitatif
- c. Informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal

3. Peran Pengendalian

Dalam perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif.

4. Peran Akuntansi Manajemen dalam Sektor Publik

a. Perencanaan Strategik (*strategic planning*)

Memberikan data/informasi akurat seputar akuntansi seperti cost of program serta *cost of activity*.

b. Pemberian Informasi Biaya

Memberikan rincian biaya sedetail mungkin meliputi biaya input, output, serta biaya proses.

c. **Penilaian Investasi**

Menggunakan analisis efektifitas biaya (*cost-effectiveness analysis*).

d. **Penganggaran**

Akuntansi manajemen sektor publik diharapkan mampu berperan dalam memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang lebih efektif

e. **Penentuan biaya pelayanan (*cost of services*) dan penentuan tarif pelayanan (*charging for service*)**

Digunakan untuk menghitung berapa banyak pengeluaran / cost yang digunakan untuk membuat layanan / jasa publik

f. **Penilaian Kinerja**

Akuntansi manajemen digunakan untuk melakukan penilaian kinerja untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas serta efisiensi organisasi guna mencapai tujuan yang sudah dicanangkan.

5. Perencanaan Strategi

Merupakan Proses penentuan program-program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan.

Tujuan utama perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer bawahnya.

6. Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Pengendalian manajemen perlu untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen meliputi aktivitas: Perencanaan, Koordinasi, Komunikasi informasi, Pengambilan Keputusan, Motivasi, Pengendalian dan Penilaian Kinerja.

BAB V

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A. Teori Penganggaran Publik

Pengertian penganggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran.

Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA), saat ini *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran *budget* yaitu, “*Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.*”

1. Sistem Penganggaran Publik

Anggaran merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah:

- a. *Traditional Budgeting System*
- b. *Performance Budgeting System*
- c. *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*

2. Traditional Budgeting System (Sistem Anggaran Tradisional)

Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran.

3. Performance Budgeting System

Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan.

4. Planning Programming Budgeting System (PPBS)

Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang maupun jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain.

Ada beberapa tahap dalam penyusunan PBBS, yaitu :

1. Menentukan tujuan yang hendak dicapai;
2. Mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu;
3. Melihat prospek perkembangan yang akan datang;
4. Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.

Setelah keempat tahap di atas selesai disusun, barulah memasuki tahap selanjutnya yang terdiri dari:

1. Menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan
2. Berdasarkan program pelaksanaan ditentukan berapa jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS adalah:

1. Untuk menerapkan sistem ini, dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan program secara terpadu.
2. Dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program tersebut.
3. Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya pelaksanaan rencana dan program.

B. Siklus Penganggaran Publik

Dalam Siklus Penganggaran Publik terdapat beberapa tahapan, yaitu :

- Penetapan Prosedur Dan Tim Penganggaran Yang Terkait
- Penetapan Dokumen Standar Harga
- Penyebaran Dan Pengisian Formulir Rencana Kerja Dan Anggaran
- Rekapitulasi Kertas Kerja
- Pembahasan Perubahan Belanja Dan Penyesuaian Draft Anggaran Pendapatan Dan Belanja
- Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

C. Teknik Penganggaran Publik

1. Pendekatan Fungsional

Kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Ini berarti anggaran disusun melalui proses internal organisasi. **Kepentingan Hukum** merupakan pemberi makna yang solid

bagi anggaran satu entitas tertentu. Sebagai produk hukum, kepatuhan dalam melaksanakan anggaran dapat dijamin.

Alokasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila bias menyeimbangkan berbagai strategi pencapaian tujuan (visi) yang telah ditetapkan. Distribusi anggaran selalu dikaitkan dengan agen pengeluaran *public* dan terlaksananya layanan public yang lebih baik.

Semua kebijakan ekonomi *sector public* selalu duhadapkan dengan berbagai variable yang dinamis, seperti pergerakan harga dan arah perekonomian. Ini berarti unsur unsur ketidakpastian tidak dapat dihilangkan, namun dapat diminimalkan oleh kapabilitas manajemen keuangan unit kerja dan inisiatif unit pemegang otoritas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan *pertama*, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga pelaksanatertinggi; *kedua*, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan poloitis berbagai lembaga; *ketiga*, akurasi perencanaan terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik *review* prakiraananggaran.

2. Pendekatan Pengambilan Keputusan

Dalam prakteknya, anggaran merupakan proses pengambilan keputusan tentang kehidupan dan tujuan organisasi. Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur- unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik.

Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi public. Tarik ulur antara konsep dengan praktis, dan konteks anggaran dengan manajemen keuangan global dilakukan untuk mencapai titik optimal.

3. Pendekatan Psikologi/Motivasi

Pendekatan psikologi/motivasi merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Psikologi/motivasi bukan saja merupakan ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia saja, namun secara lebih luas ilmu ini juga mempelajari perekrutan dan penyeleksian pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pelatihan pegawai, kepemimpinan, motivasi dan kepuasan

kerja, psikologi organisasi, kondisi pekerjaan, keselamatan dan kesehatan pegawai, tekanan di tempat kerja, psikologi industri, ataupun psikologi konsumen/masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai, penggunaan Pendekatan Psikologi/Motivasi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran yang tersusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

4. Pendekatan Lingkungan yang Berkesinambungan

Penganggaran lingkungan yang berkesinambungan dimulai dengan proses penyusunan anggaran bagi program yang berwawasan lingkungan. Anggaran program ini harus mempertimbangkan sisi pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, tujuan anggaran dan program dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan secara berkesinambungan.

D. Penganggaran Publik di Berbagai Negara Maju dan Berkembang

1. Inggris

Terdapat tiga pertalian system pembuatan keputusan

- System komite survey pengeluaran public (PSC)
- Analisis program dan review (PAR)
- Staf review kebijakan pusat (CPRS)

2. Kanada

Pendekatan PPBS Kanada sangat berbeda dengan Amerika Serikat, dimana dasar yang lebih besar diletakkan pada perencanaan pengeluaran dan penilaian efisien.

3. Prancis

- Aplikasi PPBS pada organisasi pertahanan dikenal sebagai "*planning, programming, and preparation of the budget*" dan menawarkan kerangka kerja yang terkoordinasi dan pengendalian.
- Aplikasi pada departemen sipil yang dikenal sebagai "*optimization of public expenditure*" yang lebih menekankan pada aplikasi teknik penilaian investasi.
- Keduanya, jika dikombinasikan ke dalam, akan menjadi *rationalization of the budget chise/rationalization des choix budgetires*

– RCB.

- RCB mempunyai tiga komponen: yaitu struktur program, study analitis, dan system informasi.

4. Swedia

Saat ini, system anggaran di Swedia mempunyai beberapa unsur yang mengombinasikan perencanaan, ramalan jangka menengah, dan pengukuran efisiensi.

5. Negara lainnya

- Jepang aktif memberikan pertimbangan untuk mengenalkan variasi PPBS.
- Australia, Denmark, Jerman, Selandia baru, dan belanda adalah diantara Negara yang memperkenalkan secara luas berbagai reformasi yang melibatkan pemilihan reklasifikasi anggaran kedalam program, ramalan jangka menengah, pengenalan teradap penilaian, pengukuran produktivitas, dan kinerja pada beberapa bagian.
- Yunani selama tiga tahun telah memprakarsai implementasi bentuk ZBB dan program penilaian (*productivity assessment program*). Usaha di orientasikan pada pemilihan mengadopsi beberapa bentuk ZBB, kemudian mentransplantasi systemamerika serikat.

E. Implementasi Pembaharuan di Negara-Negara Berkembang

1. Pengenalan system PPBS di India, Indonesia, Malaysia, Nepal dan Sri Lanka tidak membawa perubahan dalam mengfungsikan perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan denganbasis rangkap dua.
2. Cakupan dari system baru juga terbatas. Di Malaysia dan Indonesia, hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan, sementara di india, anggaran kinerja di siapkan sebagai dokumen pendukung.

BAB VI

RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN PEMERINTAH

A. Rencana Pembangunan Pemerintah

Pemerintah Indonesia memberikan prioritas tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh negara Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah target yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Target-target ini mencakup :

- Masyarakat yang tertib, maju, damai dan berkeadilan sosial
- Populasi yang kompetitif dan inovatif
- Demokrasi yang adil
- Perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah.
- Menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh diskala global.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia menyusun 3 rencana pembangunan yang saling terkait dan bergantung, yaitu :

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)** RPJPN ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh Indonesia (termasuk pemerintah, masyarakat dan bisnis) untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah direncanakan dan diformulasikan oleh pemerintahan terpilih di Indonesia. RPJPN ini berjalan hingga tahun 2025). Rencana ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan menyangkut perumusan rencana strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pengembangan daerah.
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**
RPJMN 2015-2019 adalah tahap yang ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (atau RPJPN 2005-2025). Rencana ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan Rencana strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pengembangan daerah.

3. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3PEI)

MP3PEI adalah sebuah masterplan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011. MP3PEI itu juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada 2025.

B. Penyusunan Anggaran APBN

1. Pengertian APBN

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN ini merupakan rencana kerja pemerintah negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal.

APBN biasanya dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun anggaran. Didalam APBN tercantum penerimaan dan pengeluaran serta pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

2. Fungsi APBN

- **Fungsi Alokasi**

Berarti negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- **Fungsi Distribusi**

Berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- **Fungsi Stabilisasi**

Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

- **Fungsi Otoriasi**

Memiliki makna bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

- **Fungsi Perencanaan**

Memiliki makna bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman

bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.

- **Fungsi Pengawasan**

Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,.

3. Tujuan APBN

Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan perlambahan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.

4. Prinsip Penyusunan APBN

- **Berdasarkan aspek pendapatan**

- - Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah kecepatan anggaran.
 - Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang Negara.
 - Penuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

- **Berdasarkan aspek pengeluaran**

- Hemat, efisien berdasarkan anggaran.
- Teratah terkendali, sesuai rencana atau program/kegiatan.
- Maksimalisasi hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan potensi nasional.

5. Asas penyusunan APBN

- a. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
- b. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- c. Penajaman prioritas pembangunan.

6. Landasan hukum APBN

- UUD 1945 pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

7. Komponen APBD

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 17 yang menyatakan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas :

1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan bukan pajak
3. Hibah

b. Belanja Negara

Belanja negara dapat dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Pemerintah Pusat
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

c. Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran memiliki 2 komponen, yaitu :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

8. Tahap Penyusunan APBN

a. Perencanaan dan Penetapan

Di tahap ini pemerintah mempersiapkan rancangan APBN, meliputi perkiraan, penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Perencanaan dan Penyusunan RAPBN dilakukan pada setiap periode Januari- Juli ditahun sebelum pelaksanaan anggaran.

b. Pengajuan, Pembahasan dan Penetapan

RAPBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh menteri keuangan, panitia anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dai DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi Undang- Undang APBN yang memuat satuan anggaran.

c. Pengawasan Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan APBN akan diawasi pengawas fungsional dari eksternal maupun internal pemerintah.

d. Penanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan

pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir.

C. Penyusunan Anggaran APBD

1. Pengertian APBD

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2. Fungsi APBD

- **Fungsi Otorisasi**

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.

- **Fungsi Perencanaan**

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- **Fungsi Pengawasan**

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

- **Fungsi Alokasi**

Bermakna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya.

- **Fungsi Distribusi**

Memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- **Fungsi Stabilisasi**

Memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Tujuan APBD

- a. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah.
- b. Membantu pihak pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya.
- c. Membantu menimbulkan prioritas belanja pemerintah daerah.
- d. Membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemda dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya ke DPRD.

4. Prinsip Penyusunan APBD

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD
- c. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- d. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Melibatkan partisipasi masyarakat
- f. Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

5. Komponen APBD

- a. Anggaran Pendapatan Daerah
 1. Pos Pendapatan Asli Daerah
 2. Pos Dana Perimbangan
 3. Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
- b. Anggaran Belanja Daerah
 1. Pos Belanja Pegawai
 2. Pos Belanja Barang dan Jasa
 3. Pos Belanja Modal
 4. Pos Belanja Lainnya
- c. Anggaran Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan pembiayaan
 2. Pengeluaran pembiayaan

6. Tahap Penyusunan APBD

- a. Tahap Perancangan dan Pengajuan.** APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung.
- b. Tahap Pembahasan dan Persetujuan.** Rancangan APBD (RAPBD) akan dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga akan memutuskan untuk setuju atau tidak mengenai RAPBD tersebut.

7. Tahapan Pelaksanaan

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, ketentuan lebih detail soal pelaksanaannya lebih lanjut akan dituangkan melalui keputusan gubernur/walikota/bupati.

8. Tahap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Penyampaian laporan ini telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah.

BAB VII

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

A. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan bagian dari ilmu akuntansi manajemen yang secara khusus digunakan untuk mengatur perencanaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual (*budgeting*). Menurut *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Akuntansi anggaran akan menguraikan aktivitas keuangan dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan melalui sistem analisa dan pengawasan.

1. Pengertian Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (*double entry*). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dengan anggarannya.

Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila akun tersebut direalisasikan, maka akun tersebut di debit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran.

Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians (selisih). Namun, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk akun-akun keuangan bukan isi (*content*) dari akun itu sendiri. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks.

Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan.

2. Tujuan Akuntansi Anggaran

Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas.

B. Akuntansi Komitmen

1. Pengertian Akuntansi Komitmen

Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersamaan dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima.

Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait, dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum (*legal liability*) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Hal ini menjadikan sulit untuk mengakui biaya-biaya untuk periode akuntansi yang bersangkutan yang mana hanya berdasarkan pada order yang dikeluarkan.

2. Tujuan Akuntansi Komitmen

Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (*overcommit*). Tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun-akun tidak memasukan order yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anggaran (*over commit the budget*).

C. Akuntansi Dana

1. Pengertian Akuntansi Dana

Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian "dana (*fund*)" dimaknai sebagai dana kas (*cash funds*). Tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci lain dan terpisah beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain di laci yang lainnya. Namun saat ini "dana" dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non kas dan utang diperhitungkan di dalamnya.

Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa di antara perusahaan pribadi dengan perusahaan bada memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah: **Pertama**, perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan dibandingkan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). **Kedua**, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua berpendapat tersebut bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana dan organisasi harus dilihat sebagai suatu rangkaian dana, maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadibagian organisasi.

Sistem akuntansi pemerintah yang menggunakan konsep dana, memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi dan entitas anggaran yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis.

Terdapat dua jenis dana yang dipergunakan pada organisasi sektor publik yaitu :

1. Dana yang dapat dibelanjakan (*expendable fund*) digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (*governmental fund*).
2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (*nonexpendable fund*) untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis.

D. Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat. Pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Namun demikian GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan menggunakan kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan *cash basis*, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas, tidak dapat diukur dengan dengan baik.

Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (*revenue*) bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (*overstated*). Hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

E. Akuntansi Akrua

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara dana kepemilikan (*full accrual*) dengan dana pemerintah (*modified accrual*) karena biaya (*expense*) diukur dalam dana kepemilikan sedangkan pengeluaran difokuskan pada dana umum. Pengeluaran (*Expense*) adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Karena dana pemerintahan tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang) *expenditure* yang diukur bukan *expense*.

Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for service*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *accrual basis* dalam sektor

swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan.

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara pemerintah kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayar kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (*earned*) atau terjadi (*incurred*), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan.

BAB VIII

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

A. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstrukturposisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Akuntansi secara normatif mempunyai 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Sifat informasi yang diberikan.
2. Pihak yang menerima atau memakai informasi.
3. Tujuan informasi diberikan. Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi :
 1. Laporan realisasi anggaran.
 2. Laporan arus kas.
 3. Neraca.
 4. Catatan atas laporan keuangan.

Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan:

1. Dari sisi internal: alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.
2. Dari sisi eksternal: mekanisme pertanggung jawaban dan sebagaidasar dalam pengambilan keputusan.
3. Tujuan informasi diberikan

B. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)
2. Akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (*accountability and restrospective reporting*).
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*).
4. Kelangsungan organisasi (*viability*).

5. Hubungan masyarakat (*public relation*).
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan.
2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.
3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.
4. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundangundangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.

Kinerja Manajerial dan Organisasi

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba.

Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik.

Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut *statement of financial accounting concepts* No 4 (SFAC 4).

- Bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional.
- Untuk menilai pelayanan.
- Menilai kinerja manajer organisasi.
- Memberi informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan.
- Informasi kinerja selama satu periode.
- Informasi cara memperoleh dan membelanjakan kas.
- Memberi penjelasan dan interpretasi.

C. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemakai laporan keuangan terdapat beberapa pengklasifikasian. Berikut ini diidentifikasi terdapat 10 (sepuluh) kelompok pemakai laporan keuangan.

1. Pembayar pajak (*taxpayers*).
2. Pemberi dana bantuan (*grantors*).
3. Investor.
4. Pengguna jasa (*fee-paying service recipients*).
5. Karyawan/pegawai.
6. Pemasok (*vendor*).
7. Dewan legislatif.
8. Manajemen.
9. Pemilih (*voters*)
10. Badan pengawas.

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu :

1. Lembaga pemerintah (*governing bodies*).
2. Investor dan kreditor.
3. Pemberi sumber daya (*resource providers*).
4. Badan pengawas (*oversight bodies*).
5. Konstituen.

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 12 (dua

belas) kelompok, yaitu:

1. Anggota terpilih (*elected members*).
2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak.
3. Pelanggan atau klien.
4. Karyawan/pegawai.
5. Pelanggan dan pemasok.
6. Pemerintah.
7. Pesaing (*competitors*).
8. Regulator.
9. Pemberi pinjaman.
10. Donor dan sponsor. Anggota terpilih (*selected members*).
11. Investor atau partner bisnis.
12. Kelompok penekan lainnya

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 11 (sebelas) kelompok, yaitu:

1. Masyarakat pengguna jasa publik.
2. Masyarakat pembayar pajak.
3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi.
4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah.
5. Badan-badan internasional, seperti bank dunia, IMF, ADB, PBB dan lain sebagainya.
6. Investor asing.
7. Generasi yang akan datang.
8. Lembaga negara.
9. Kelompok politik (partai politik)
10. Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/bumd).
11. Pegawai pemerintah.

Serikat dagang sektor publik mengidentifikasi pemakai laporan pemerintah menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab.
2. Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat.
3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/atau

berpartisipasi dalam proses pemberi pinjaman.

Tugas untuk menyediakan informasi bagi internal organisasi dan eksternal ini adalah tugas dari seorang akuntan sektor publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah memberikan amanah.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana.

Contohnya, pertanggungjawaban unit pengelolaan kedinasan kepada aparat pemerintahan, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana.

D. Fungsi Dan Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan sektor publik memiliki fungsi sebagai berikut:

Kepatuhan dan Pengelolaan

Dengan membuat laporan keuangan berarti sudah menjadi jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik, sesuai dengan hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk:

- Mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen.
- Mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan.
- Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis.
- Memungkinkan untuk pihak luar mengetahui biaya atas barang dan jasa yang telah diterima.
- Mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi.

Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana.

Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kelangsungan organisasi apakah masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa atau tidak.

E. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta

Pengelolaan laporan keuangan oleh sektor publik dan swasta memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen, tujuan, dan teknik akuntansi yang digunakan.

Laporan Keuangan Sektor Publik	Laporan Keuangan Swasta
Fokus Finansial dan politik	Fokus finansial
Kinerja diukur secara finansial dan non- finansial	Sebagian besar kinerja diukur secara finansial
Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur
Berfokus pada bagian organisasi	Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
Melihat kemasa depan secara detail	Tidak dapat melihat masa depan secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan	Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal dan praktik akuntansi
Laporan diperiksa oleh trasury	Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen
Cash Accounting	Accrual accounting

F. Dampak Laporan Keuangan Sektor Publik

Dampak jika laporan keuangan organisasi sektor publik buruk, maka akan menyebabkan :

1. Kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik

(pemerintah) akan menurun

2. Penanam modal atau investor tidak berani menanamkan modalnya lagi.
3. Para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
4. Mempengaruhi pengambilan keputusan.
5. Laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur kinerja

G. Bentuk – Bentuk Laporan Keuangan

1) Laporan Kinerja Keuangan/ Surplus – Defisit

Pada laporan ini mirip dengan laporan rugi-laba pada entitas bisnis. Laporan surplus–defisit menggambarkan kinerja keuangan pada organisasi sektor publik, yaitu ketika total pendapatan/ penerimaan lebih besar daripada total biaya/belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit. Laporan ini juga disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus rugi, dan laporan operasi. Format laporan kinerja keuangan/Surplus – Defisit dapat dilihat di SAP.

2) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Format LRA dapat dilihat di SAP.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Laporan ini diawali dari ekuitas awal periode kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik. Format Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat di SAP.

4) Laporan Posisi Keuangan atau Neraca

Laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, dimana didalamnya terdapat elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut sehingga laporan posisi keuangan/neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik. Format laporan posisi keuangan atau neraca dapat

dilihat di SAP.

5) Laporan Arus Kas

Laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi, pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi.

Terdapat dua metode dalam menyajikan arus kas yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Format laporan arus kas dapat dilihat di SAP.

BAB IX

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

A. Pengertian dan Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Kinerja pada sektor publik melalui sistem dan pengukuran yang menjembati suatu keadaan yang dapat mengembangkan suatu pencapaian kinerja dan mengiringi laju perkembangan tolak ukur keuangan. Landasan mengenai pengukuran kinerja organisasi mencapai batasan yang tak terhingga dan sesuai dengan target kinerja pada organisasi. Organisasi sektor publik merupakan suatu landasan yang riil atau nyata yang kompeten pada anggota masing – masing yang memiliki ilmu serta wawasan yang luas serta membantu keadaan serta kelayakan pada situasi tertentu.

Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment systems. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and bottom up*)
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur berkembang pencapaian strateginya
- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai *good congruence*
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan atau

organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Pengukuran kinerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggung jawabannya. Pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.

C. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Sektor Publik

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
- 2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
- 3) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
- 4) Evaluasi kinerja *feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

D. Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja Sektor Publik

1) Informasi Finansial

Penilaian kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada:

- a) Varians pendapatan (*revenue variance*)
- b) Varians pengeluaran (*expenditure variance*)
- c) Varians belanja rutin (*recurrent expenditure variance*)
- d) Varians belanja investasi/modal (*capital expenditure variance*)

Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah.

2) Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi saat

ini adalah balance scorecard. Dengan balance scorecard kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek financial saja. Akan tetapi juga dari sisi aspek nonfinansial. Pengukuran dengan metode *balance scorecard* melibatkan empat aspek, yaitu:

- a) Perspektif financial (*financial perspective*)
- b) Perspektif kepuasan pelanggan (*customer perspective*)
- c) Perspektif efisiensi proses internal (*internal process efficiency*)
- d) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

E. Peran Indikator Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Indikator Kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan dari strategi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut dapat berbentuk;

1) Faktor Keberhasilan Utama

Faktor Keberhasilan Utama adalah suatu area yang mengidentifikasi kesuksesan kinerja unit organisasi.

2) Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci adalah sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis.

3) Pengembangan Indikator kinerja

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktifitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Penentuan Indikator Kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut:

- a. Biaya Pelayanan (*cost of service*)
- b. Penggunaan (*utilization*)
- c. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*)
- d. Cakupan Pelayanan (*coverage*)
- e. Kepuasan (*satisfaction*)

Pengukuran Kinerja Sektor Publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas

organisasi sektor publik dalam pemberian Pelayanan publik.

- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

BAB X

AKUNTANSI DESA

A. Gambaran Umum Pemerintahan Desa

Untuk bisa memahami laporan keuangan desa, maka perlu dijelaskan tentang gambaran umum pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa.

Kepala desa sebagai pemimpin di desanya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Mengajukan rancangan peraturan desa.
- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- Membina kehidupan masyarakat desa.
- Membina perekonomian desa.
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk -mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Selain kewenangan, kepala desa juga dibebani tugas sebagai berikut:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta -mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa.
- Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan

Kepala desa dapat melaksanakan kewenangan dan tugasnya, maka perlu dilengkapi dengan perangkat desa. Dalam struktur organisasi desa, Kepala Desa juga dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas:

- Carik (Sekdes/Sekretaris) = adalah pelaksana sekretaris desa
- Kebayan = tugasnya merupakan mengurus data-data desa
- Lado = tugasnya merupakan dalam hal irigasi
- Modin = tugasnya merupakan dalam hal keagamaan
- Petengan = merupakan komandan keamanan alias komandan hansip
- Kamituwo = yang mengurus bengkok dan tanah.

Kepala Desa yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan desa. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka dekonsentrasi. Tugas dan wewenang kepala desa sebagai wakil pemerintah kecamatan adalah:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di desa;
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di desa.

Dalam kedudukannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada Kepala Camat.

B. Pengertian Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan, pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

C. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk melakukan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai berikut:

- Kepala Desa
- Sekertaris Desa
- Kepala Seksi
- Kaur Keuangan/Bendahara Desa

D. Asas Keuangan Desa

Keuangan Desa terdiri dari 4 (empat) asas, agar bisa dikelola, asastersebut terdiri dari:

1. Asas Transparan

Dalam pengelolaan keuangan, informasi keuangan harus diterbitkan secara terbuka dan penyajiannya harus dilakukan dengan jujur oleh pihak yang berwenang.

2. Asas Akuntabel

APBDesa dilaporkan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berwenang, sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Asas Partisipatif

Tahapan pengelolaan keuangan desa dari awal hingga akhir harus melibatkan peran serta masyarakat didalamnya.

4. Asas Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran diartikan bahwa anggaran yang dibuat harus dilaksanakan secara konsisten.

E. Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan secara keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasar pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memperoleh sumber dana dari APBDesa. Pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

F. Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan aparatur desa. Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa saat ini masih menggunakan basis kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sesuai dengan perkembangan jaman, Laporan Keuangan Desa diarahkan menggunakan basis akrual dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Salah satu tujuan Laporan keuangan Desa disusun yaitu dalam rangka menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola atau dipercayakan kepada pemerintah desa.

G. Pembuatan Anggaran dan Proposal Dusun

Dana yang akan digulirkan dari pemerintah sebesar 10% dari APBN ini akan diberikan secara langsung kepada desa-desa. Kemudian tiap desa akan mengalirkan dana-dana tersebut kepada dusun-dusun di bawah desa. Agar dana yang mengalir dari desa ke masing-masing dusun dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibuat anggaran masing-masing dusun beserta proposal kegiatannya.

BAB XI

AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

A. Seluk Beluk Organisasi Nirlaba

Organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Organisasi adanya didirikan karena kesamaan kepentingan, baik dalam rangka untuk mewujudkan hakikat kemanusiaan maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan. Organisasi yang berorientasi atau memiliki tujuan yang bersifat laba maupun non laba selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah dibuat atau ditetapkan.

Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan sekelompok manusia yang bekerja sama dalam melakukan kegiatan yang dibimbing oleh seorang pemimpin dalam upaya mencapai tujuannya. Entitas nirlaba merupakan entitas yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Entitas nirlaba ini biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Sumber dana yang didapat oleh entitas nirlaba biasanya berasal dari para donator atau penyumbang yang tidak mengharapkan imbal balik atas dana yang diberikan.

Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mencari laba, seperti organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan. Organisasi nirlaba pada umumnya memilih pemimpin, pengurus atau penanggungjawab yang menerima amanat dari para *stakeholder*-nya. Terkait dengan konsep akuntabilitas dimana akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban akuntabilitas maka laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba.

Alasannya karena dengan laporan keuangan maka dapat menilai pertanggungjawaban dari pengurus/manajemen atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan kepadanya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba telah diterbitkan pada tanggal 23 Desember 1997 dan kemudian direvisi pada tanggal 8 April 2011. PSAK 45 menjadi rujukan utama lembaga yang tidak berorientasi laba seperti

Yayasan dalam penyajian laporan keuangan.

Namun mulai tahun 2019, PSAK 45 diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Dengan keluarnya peraturan baru ini maka organisasi nirlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35. Tapi munculnya peraturan baru ini, terasa sulit untuk diterapkan oleh organisasi nirlaba karena banyak organisasi nirlaba yang tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi sehingga sulit untuk melaksanakannya.

Karakteristik Organisasi Nirlaba

Karakteristik organisasi nirlaba ini berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada cara organisasi ini mendapatkan sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012).

Menurut PSAK 45 jenis laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari 4 jenis yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Menurut ruang lingkup PSAK 45 organisasi non profit/nirlaba memiliki ciri-ciri seperti berikut:

- a. Sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan sumber daya yang mereka dikorbankan.
- b. Organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Jika entitas menghasilkan laba maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas.
- c. Di organisasi ini tidak ada kepemilikan yang jelas seperti organisasi lain. Artinya dalam organisasi non profit ini tidak dapat dijual, dialihkan atau dikembalikan sumbangannya.

Organisasi Nirlaba di Indonesia

1. Yayasan

Dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah UU No 28 Tahun 2004 yang mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Maksudnya, organisasi ini ditujukan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, bidang keagamaan, atau

bidang kemanusiaan lainnya yang dapat membantu masyarakat. Yayasan memiliki ciri khas yaitu kepemilikannya yang eksklusif.

2. Lembaga Perkumpulan (Asosiasi)

Lembaga asosiasi seringkali didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan yang ada diantara para anggotanya yang tergabung. Asosiasi dibedakan menjadi dua yaitu asosiasi gabungan dengan memiliki hukum dan asosiasi biasa yang tidak memiliki hukum. Jika ada lembaga asosiasi yang ingin mendapatkan perlindungan hukum, lembaga tersebut harus mempersiapkan surat pendaftaran. Surat pendaftaran ini nantinya akan diajukan ke ketua pengadilan negeri. Setelah surat pendaftarannya disetujui dan disahkan oleh pengadilan distrik, maka akan keluar surat perlindungan hukum dari Departemen Hukum dan HAM.

3. Institut

Institut adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh institusi adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lembaga kursus belajar, institute pelatihan kerja dan sebagainya.

Dari ketiga contoh lembaga organisasi nirlaba tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan sebenarnya didirikannya organisasi nirlaba adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari bentuk penyajian organisasinya yang membantu dalam melayani masyarakat, mencerdaskan anak bangsa dan memberikan kebebasan bagi masyarakat. Meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mendirikan lembaga nirlaba, tapi manfaatnya sangat luar biasa.

B. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meskipun demikian *non-for-profit* juga harus diartikan sebagai *not-for-loss*. Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan dikembalikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik, dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut.

Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan
- Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

- Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
- Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain.
- Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan. Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya.

Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

1. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi,

kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

2. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:
3. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
4. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

C. Organisasi Nirlaba - Contoh Kasus

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan PSAK 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Namun PSAK 45 telah dicabut sehingga acuan untuk penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba mengacu ke ISAK 35.

Untuk dapat membuat laporan keuangan dana masjid dengan akurat dibutuhkan penerapan akuntansi, dan peranan akuntansi disini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Pencatatan keuangan masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja tanpa memperlihatkan jumlah aset yang dimiliki oleh masjid dan berapa nilainya, sehingga banyak kasus hilangnya aset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan.

Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya (ta'mir). Organisasi masjid merupakan organisasi nirlaba, yaitu dalam menjalankan usaha tidak mencari laba, namun semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umat. Modal yang dimiliki oleh masjid biasanya juga cukup besar, terdapat sebidang tanah dan nilai bangunan, juga peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam masjid.

Sumber pendapatan masjid biasanya terdiri dari Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqof dan sumber pengeluaran masjid terdiri dari biayarutin

(listrik,air), biaya kebersihan,biaya kegiatan Islami yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati harihari besar Islam Maulid Nabi SAW, safariRamadhan, dan lain sebagainya, dana perbaikan peralatan masjid dll.Takmir menjalankan perannya berdasarkan kepercayaan umat, maka laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban parapengurus masjid atau takmir sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan yang telah diberikan.

Bentuk Pengelolaan Keuangan Pada Lembaga Masjid

Pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan *cash basis* yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metode *cash basis* tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi dengan *accrual basis* dianggap lebih baik daripada *cash basis* karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan.

Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal (*single entry method*) dengan alasan lebih praktis dan mudah. Penggunaan *single entry method* tidak lagi tepat untuk diterapkan karena tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif, maka penggunaan *single entry method* dengan alasan kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi. Sistem pelaporan keuangan pada masjid masih berbentuk format biasa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Biasanya hanya berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar.

Pelaporan keuangan itu sendiri dibuat untuk proses pertanggungjawaban kepada para jama'ah masjid sebagai suatu sifat keterbukaan dan transparansinya suatu laporan keuangan. Berikut Penyajian Laporan Keuangan baik laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dapat dilihat pada ISAK 35.